

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah bagian dari sistem ekonomi suatu negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Instansi pemerintah, partai politik, sekolah, dan rumah sakit merupakan bagian organisasi sektor publik. Pelayanan masyarakat menjadi fokus utama dari organisasi sektor publik (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021).

Menurut Pratiwi & Setyowati (2017) organisasi sektor publik dalam penyelenggaraannya wajib melakukan akuntabilitas dan transparansi publik. Akuntabilitas menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dari organisasi sektor publik atas pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam periode tertentu. Pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat berwujud laporan yang telah disampaikan kepada ketua lembaga, lembaga pengawasan, dan lembaga penilai akuntabilitas. Menurut Setiawan (2019) organisasi sektor publik wajib melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatannya secara sistematis dan terstruktur selama periode pelaporan. Salah satu tugasnya ialah menyusun laporan keuangan.

Menurut Ifanka & Sari (2022) laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan pendapatan, pengeluaran, transfer, dan realisasi pendanaan dengan anggaran tertentu, menilai posisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk membuat keputusan. Dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik, penjabaran kualitas pelaporan keuangan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan organisasi sektor publik wajib memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan, khususnya pelaporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ningrum & Sundari, 2022).

Kinerja organisasi sektor publik merupakan gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Audyta, 2013). Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam peningkatan akuntabilitas organisasi. Kinerja diukur dengan menggunakan indikator kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome*. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan diperlukan susunan rencana kinerja yang memuat tujuan dan penjabaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi sektor publik (Sunardi et al., 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan Nirwana & Haliah (2018) istilah kinerja sangat familier dalam pelaksanaan tata kelola lembaga pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik yang melayani masyarakat. Hal ini terlihat terutama sejak dikeluarkannya berbagai regulasi terkait dengan reformasi tata kelola.

Berbagai peraturan dan kebijakan pendukung lainnya juga telah dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Terdapat fenomena permasalahan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Fenomena masalah ini timbul karena faktanya kinerja dan pengelolaan keuangan organisasi berada di bawah kualitas yang diharapkan dan umumnya buruk atau lemah. Berbagai upaya evaluasi terhadap pengelolaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Erawan et al. (2021) menunjukkan reformasi birokrasi di lembaga pemerintah Indonesia belum terlaksana dengan baik di seluruh lembaga. Terdapat lembaga yang ditemukan tidak mempublikasikan laporan kinerja di situs web organisasi, meskipun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur.

Kinerja organisasi sektor publik harus diukur untuk mengetahui bagaimana organisasi dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja telah menjadi proses sistematis untuk mengevaluasi apakah program kegiatan yang dirancang diimplementasikan sesuai rancangan dan apakah tercapainya keberhasilan yang telah ditargetkan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang paling penting untuk mencapai kinerja organisasi sektor publik yang baik (Indrawati, 2017). Akuntabilitas merupakan keterbukaan informasi, kegiatan keuangan organisasi dan kinerja kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, jika organisasi sektor publik memiliki akuntabilitas yang baik maka dapat meningkatkan kinerja organisasi karena

hasil kinerja organisasi dapat diperoleh dari pencapaian akuntabilitas. Organisasi sektor publik perlu memperhatikan beberapa hal dalam menghadapi akuntabilitas publik seperti efektifitas pelaksanaan anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan (Kiri & Handayani, 2021).

Menurut Tran et al., (2021) kualitas pelaporan keuangan tampaknya mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dan akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan yang lebih luas seperti masyarakat umum. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan efektivitas akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan sumber daya publik. Adanya penerapan akuntabilitas yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi publik. Penelitian ini digunakan untuk melakukan studi empiris lebih lanjut untuk mengklarifikasi peran kualitas laporan keuangan dalam menentukan akuntabilitas, memberikan bukti empiris tentang dampak akuntabilitas terhadap kinerja, sambil mengeksplorasi peningkatan kualitas pelaporan keuangan, dan peningkatan kinerja pada organisasi sektor publik. Dengan demikian maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik?

2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik?
4. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik melalui akuntabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja organisasi sektor publik.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik melalui akuntabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik.
2. Secara praktis
 - a. Bagi organisasi sektor publik

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait peran akuntabilitas dalam kualitas laporan keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik.